



**ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017– 2018**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I  
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Diny Ayu Wulandhari**

**14010115120037**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2022**

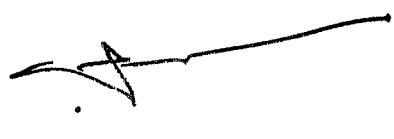
## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten  
Kendal Tahun Anggaran 2017-2018  
Nama Penyusun : Diny Ayu Wulandhari  
NIM : 14010115120037  
Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Semarang, Juni 2022

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

NIP. 19660727 199203 1 001

Wakil Dekan 1



Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin

NIP. 19690822 199403 1 003

### Dosen Pembimbing:

1. Dra. Puji Astuti, M.Si



### Dosen Pengaji:

1. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si



2. Dr. Supratiwi, S.Sos, M.Si



## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Diny Ayu Wulandhari
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010115120037
3. Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 15 Maret 1997
4. Jurusan / Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan
5. Alamat : Ketileng Indah Utara 1 No17,  
Kota Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

*“Analisis Anggaran Responsif Gender  
di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018”*

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain.

Apabila kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Semarang, 17 Juni 2022

Pembuat Pernyataan;



Diny Ayu Wulandhari

NIM. 14010115120037

## **MOTTO**

*“LIVE IS A GAME, WE BORN TO PLAY”*

dan

*“LAST BUT NOT LEAST*

*I WANT TO THANK ME*

*I WANT TO THANK ME FOR BELIEVING IN ME*

*I WANT TO THANK ME FOR DOING ALL THIS HARD WORK*

*I WANT TO THANK ME FOR HAVING NO DAYS OFF*

*I WANT TO THANK ME FOR EVER QUITTING*

*I WANT TO THANK ME FOR ALWAYS BEING A GIVER*

*AND TRYING TO GIVE MORE THAN I RECEIVE*

*I WANT TO THANK ME FOR*

*TRYING TO DO MORE RIGHT THEN WRONG*

*I WANT TO THANK ME FOR JUST BEING ME AT ALL TIME”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, Saya persembahkan untuk :

“Dosen Pembimbing saya Ibu Dra. Puji Astuti yang sudah membimbing saya dengan sangat hebat, Dosen Wali saya Ibu Sulistyowati yang sudah menjadi wali perkuliahan saya dengan sangat tulus dan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Ibu Rina Martini yang sudah membantu mahasiswa akhir sekali seperti saya dengan sangat sabar”

Dan skripsi ini, Saya persembahkan untuk :

“Keluarga saya Papah Antok, Ibu Andri, Mamah Nining, Ayah Bobi, Mbah Putri Sugiri, Mbah Putri Hawa, Mbah Putri Tandang, Adek Tata, Adek Faiz, Adek Haidar”

Dan karya ini, Saya persembahkan untuk :

“One and Only Ajudika Mahendra yang selalu percaya kalau i can do finnish it”

Terkhusus untuk :

Siapapun yang bertanya kapan saya lulus

## **ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017-2018**

Diny Ayu Wulandhari

14010115120037

*e-mail : [ayudiny62@gmail.com](mailto:ayudiny62@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan integrasi dari PUG guna mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, dan kesetaraan pada capaian pembangunan. Namun meski demikian, realita yang ada di lapangan pelaksanaan penganggaran responsif gender khususnya di Kabupaten Kendal masih kurang optimal dalam mengakomodasikan kebutuhan gender. Hal ini di duga karena isu gender belum menjadi isu prioritas dan SKPD masih belum memahami apakah yang dimaksud dengan ARG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan serta kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan anggaran responsif gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018. Metode dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Yang mana, penulis akan meneliti dan mewawancarai beberapa informan di SKPD yang telah melaksanakan ARG secara rinci dengan harapan mendapatkan data yang komprehensif terkait dengan ARG.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ARG di Kabupaten Kendal masih belum maksimal serta tidak terdapatnya poin yang mewajibkan SKPD untuk menganggarkan responsif gender. Dari 33 SKPD hanya terdapat 6 SKPD yang melaksanakan ARG. Analisis kategori alokasi anggaran yaitu Anggaran Khusus Target Gender terdapat 21 program, Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender terdapat 5 program dan Anggaran Kesetaraan Gender Secara Umum terdapat 22 program. Kendala penerapan anggaran responsif gender yakni faktor kebijakan meliputi kekuatan hukum dan komitmen pemerintah, faktor struktural meliputi kapasitas sumber daya manusia masih dominasi struktur dan faktor kultural meliputi derajat partisipasi perempuan dan pandangan gender.

Saran yang dapat disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat menyusun kebijakan daerah melalui peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan dengan jelas dalam mengatur PUG dan ARG, sehingga semua SKPD atau badan pelaksana otonomi daerah akan secara keseluruhan menyusun program dan kegiatan yang merespon kebutuhan gender. Sehingga pelaksanaan ARG di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan optimal.

Kata kunci : *Anggaran Responsif Gender, Kategori, Kendala*

## **GENDER RESPONSIVE BUDGETING ANALYSIS IN KENDAL REGENCY 2017-2018 FISCAL YEAR**

Diny Ayu Wulandhari

14010115120037

*e-mail : ayudiny62@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Gender Responsive Budgeting (ARG) was an integration of PUG that can accommodate justice for women and men to have equal opportunities in obtaining access, benefits, participation, and equality in development achievements. However, the reality on the ground, especially in Kendal Regency 2017-2018 fiscal year, is that the implementation of gender-responsive budgeting is still not optimal in accommodating gender needs. This is suspected because gender issues have not become a priority issue and SKPD still does not understand what is meant by ARG.*

*This study aims to find out how the implementation and constraints that affect the implementation of the gender-responsive budget in Kendal Regency 2017-2018 fiscal year. The method in study is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. In which case, the author will research and interview several informants at SKPD who have implemented ARG in detail in the hope of obtaining comprehensive data related to ARG.*

*The results of this study show that the implementation of ARG in Kendal Regency is still not optimal and there are no points that require SKPD to budget for gender responsiveness. Of the 33 SKPDs, there are only 6 SKPDs that carry out ARG. The analysis of the budget allocation category, Special Budget for Gender Targets, there are 21 programs, the Gender Equality Institutional Budget has 5 programs and the Gender Equality Budget in General there are 22 programs. Constraints on the implementation of gender-responsive budgets are policy factors including legal strength and government commitment, structural factors including human resource capacity and the dominance of structures and cultural factors including the degree of women's participation and gender views.*

*The suggestion that can be conveyed to the Kendal Regency Regional Government is that the Kendal Regency Regional Government can formulate regional policies through regional regulations as a clear implementation guideline in regulating PUG and ARG, so that all SKPD or regional autonomy implementing bodies will overall compile programs and activities that respond to gender needs. So that the implementation of ARG in the Kendal Regency Regional Government can run optimally.*

*Keywords : Gender Responsive Budgeting, Categories, Constraints*

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Allah SWT yang sudah memberi rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, hingga penulis bisa menuntaskan Tugas Akhir ini selaku persyaratan kelulusan Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP).

Tugas Akhir ini dapat dituntaskan secara baik berkat bimbingan, petunjuk, saran, masukan serta bantuan dari beragam pihak. Maka, penulis mengucap terima kasih pada :

1. Allah SWT yang sudah memberikan kelancaran guna penyelesaian skripsi ini
2. Dr.Drs. Hardi Warsono, M.TP sebagai Dekan FISIP UNDIP Semarang
3. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si. sebagai Kepala Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang
4. Dra. Puji Astuti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberi waktu guna memberi dukungan, bimbingan serta saran bagi penulis saat pembuatan skripsi ini.
5. Dra. Sulistyawati, M.Si sebagai dosen wali
6. Dra. Supratiwi, S.Sos, M.Si sebagai dosen pengaji
7. Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang
8. Semua Staff Akademik dan Perpustakaan FISIP UNDIP Semarang

9. Sahabat semasa perkuliahan CUMI (Anjani, Arum, Mitha, Titin) dan Yuditya Yasmin
10. Sahabat hahahahe Anggraeni Cuke dan Ria Cike serta Vanny Orta dan Ery Embew
11. Dan sekali lagi one and only Mas Ajudika Mahendra
12. Semua pihak yang membantu saat pembuatan skripsi ini.

Semoga seluruh pihak yang sudah membantu pembuatan skripsi ini mendapatkan pahala kebaikan dari Allah SWT. Kedepannya semoga skripsi ini memberi berkah serta manfaat untuk pembacanya.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna, maka kritik serta masukan yang membangun amat diperlukan untuk pembuatan karya ilmiah yang berikutnya.

Semarang, 17 Juni 2022

Diny Ayu Wulandhari

NIM. 14010115120037

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI).....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Secara Teoritis .....	12
1.4.2 Secara Praktis .....	13
1.5 Landasan Teori.....	14
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	14
1.5.2 Kajian Teori Gender .....	17
1.5.3 Kajian Teori Kebijakan Publik.....	23
1.5.4 Kajian Teori Anggaran .....	25
1.5.5 Kerangka Berpikir .....	29
1.6 Metode Penelitian .....	30
1.6.1 Desain Penelitian .....	31
1.6.2 Lokasi Penelitian .....	32
1.6.3 Subjek Penelitian .....	32
1.6.4 Jenis Data .....	33
1.6.5 Sumber Data .....	34

<b>1.6.6 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>1.6.7 Analisis Data .....</b>	<b>35</b>
<b>1.6.8 Kualitas Data .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KENDAL .....</b>	<b>38</b>
<b>2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal .....</b>	<b>38</b>
<b>2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi .....</b>	<b>38</b>
<b>2.1.2 Kondisi Demografis.....</b>	<b>44</b>
<b>2.2 Gambaran Umum Gender .....</b>	<b>45</b>
<b>2.2.1 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....</b>	<b>45</b>
<b>2.2.2 Kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....</b>	<b>46</b>
<b>2.2.3 Kondisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....</b>	<b>47</b>
<b>2.2.4 Kondisi Keterwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017-2018.....</b>	<b>50</b>
<b>3.2 Kategori Anggaran Responsif Gender .....</b>	<b>52</b>
<b>3.2.1 Anggaran Khusus Target Gender (Spesifik Gender).....</b>	<b>53</b>
<b>3.2.2 Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender (Tindakan Afirmasi) .....</b>	<b>75</b>
<b>3.2.3 Anggaran Kesetaraan Gender (Secara Umum) .....</b>	<b>82</b>
<b>3.3 Analisis Anggaran Responsif Gender .....</b>	<b>104</b>
<b>3.4 Kendala Penerapan Anggaran Responsif Gender .....</b>	<b>109</b>
<b>3.4.1 Faktor Kebijakan .....</b>	<b>109</b>
<b>3.4.2 Faktor Struktural.....</b>	<b>113</b>
<b>3.4.3 Faktor Kultural .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>125</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>133</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Anggaran Responsif Gender .....	14
Tabel 1. 2 Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender .....	18
Tabel 2. 1 Luas dan Wilayah Administratif.....	39
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kendal.....	45
Tabel 2. 3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah.....	45
Tabel 2. 4 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah.....	46
Tabel 2. 5 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal dengan Provinsi Jawa Tengah.....	47
Tabel 2. 7 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	48
Tabel 3. 1 Anggaran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat.....	54
Tabel 3. 2 Anggaran Kegiatan Kesehatan Perempuan.....	55
Tabel 3. 3 Anggaran Advokasi Pendampingan Korban Kekerasan.....	56
Tabel 3. 4 Anggaran Pembinaan Organisasi Wanita .....	57
Tabel 3. 5 Anggaran Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kewanitaan....	58
Tabel 3. 6 Anggaran Sosialisasi Advokasi Tenaga Kerja Perempuan.....	59
Tabel 3. 7 Anggaran Sosialisasi Pola Pendidikan Anak .....	60
Tabel 3. 8 Anggaran Pelatihan Pembuatan Aneka Masakan .....	61
Tabel 3. 9 Anggaran Pendampingan Industri Rumahan .....	62
Tabel 3. 10 Anggaran Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan ...	63
Tabel 3. 11 Anggaran Pengembangan Pangan Alternatif Mendukung Diversifikasi Olahan Pangan .....	64
Tabel 3. 12 Anggaran Pelatihan dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak.....	65
Tabel 3. 13 Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .....	66
Tabel 3. 14 Anggaran Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak .....	67
Tabel 3. 15 Anggaran Upaya Kesehatan Masyarakat.....	68

Tabel 3. 16 Anggaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat .....	69
Tabel 3.17 Anggaran Pengadaan Peningkatan Prasarana Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.....	70
Tabel 3.18 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) .....	71
Tabel 3. 19 Anggaran Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (PPT).....	72
Tabel 3. 20 Anggaran Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat .....	73
Tabel 3.21 Anggaran Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau .....	74
Tabel 3. 22 Anggaran Sosialisasi Penanganan Kekerasan dan Peraturan Bupati..	77
Tabel 3. 23 Anggaran Sosialisasi Penanganan Kekerasan dan Peraturan Bupati..	78
Tabel 3. 24 Anggaran Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender .....	79
Tabel 3. 25 Anggaran Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender .....	80
Tabel 3. 26 Anggaran Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.....	81
Tabel 3. 27 Anggaran Fasilitasi Pengembangan Perumahan Berbasis Komunitas	84
Tabel 3.28 Anggaran Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan.....	85
Tabel 3. 29 Anggaran Operasional Pokja Perumahan .....	86
Tabel 3. 30 Anggaran Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	87
Tabel 3.31 Anggaran Penyusunan Peraturan Daerah Prasarana Sarana Utilitas Perumahan.....	88
Tabel 3.32 Anggaran Pembinaan dan Pelatihan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia .....	89
Tabel 3.33 Anggaran Sosialisasi Desa Layak Anak dan Pembentukan Forum Anak .....	90
Tabel 3. 34 Anggaran Pelatihan Personal Branding .....	91
Tabel 3. 35 Anggaran Pelatihan Kewirausahaan.....	92

Tabel 3.36 Anggaran Pelatihan Konverensi Hak Anak bagi Guru Bimbingan Konseling .....	93
Tabel 3. 37 Anggaran Peningkatan Kapasitas Aparatur .....	94
Tabel 3. 38 Anggaran Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.....	95
Tabel 3. 39 Anggaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Desa ...	96
Tabel 3.40 Anggaran Pelestarian Pengelolaan Aset-Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan .....	97
Tabel 3. 41 Anggaran Pembekalan Kepala Desa.....	98
Tabel 3. 42 Anggaran Evaluasi Pembangunan Desa .....	98
Tabel 3. 43 Anggaran Fasilitasi Pembentukan Lembaga Badan Usaha Desa .....	99
Tabel 3. 44 Anggaran Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa .....	100
Tabel 3. 45 Anggaran Penyusunan Profil Potensi Desa atau Kelurahan .....	101
Tabel 3. 46 Anggaran Pembinaan Teknologi Tepat Guna.....	102
Tabel 3.47 Anggaran Pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kapasitas Kawasan Perdesaan.....	103
Tabel 3.48 Anggaran Pembinaan dan Verifikasi Data Berbasis Sistem Informasi Desa.....	104
Tabel 3.49 Perbandingan Alokasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 .....	107

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018 .....	4
Gambar 1. 2 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal.....	5
Gambar 1. 3 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal.....	6
Gambar 1. 4 Perbandingan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Sebagai Parlemen di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018.....	7
Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 ....	8
Gambar 1. 6 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018 .....	9
Gambar 1. 7 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Kendal Tahun 2017-2018.....	10
Gambar 1. 8 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Kendal .....	40